

Urgensi Humanisme dalam Pendidikan Abad ke-21

The Urgence of Humanism in 21st Century Education

Danu Eko Agustinova

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

danu_eko@uny.ac.id

Informasi artikel

ABSTRAK

Kata Kunci:
Humanisme,
Pendidikan
abad 21,
Globalisasi

masyarakat Indonesia, mengimplikasikan banyak hal dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Pendidikan abad 21 dinilai sebagai suatu bentuk alternatif agar generasi muda semakin adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman. Walaupun tidak sepenuhnya keliru, dampak negatif dari beragamnya interpretasi makna pendidikan abad 21 juga tidak dapat dihindari, salah satunya adalah ketimpangan pendidikan di Indonesia. Pada masyarakat urban, pendidikan muncul sebagai komoditas perdagangan yang mendorong munculnya kelas sosial sehingga berlaku sistem “yang kaya semakin kaya; yang miskin semakin miskin”; sementara pada masyarakat terpencil masih berlaku sistem konvensional yang disebut oleh Paulo Freire sebagai kebudayaan bisu. Berkaca dari hal inilah, nilai-nilai humanis menunjukkan urgensinya sebagai salah satu alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif serta menghimpun informasi menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai humanis sangat penting untuk diinternalisasikan dalam rangka menghindari dampak negatif ketidakmerataan penerapan pendidikan abad 21, seperti teknosentrisme dan komersialisasi pendidikan. internalisasi nilai-nilai humanis dapat diwujudkan melalui penggunaan metode, media dan model pembelajaran yang sesuai kebutuhan; serta konten pembelajaran yang kontekstual.

Keywords:

Humanism,
21st Century
Education,
Globalization

ABSTRACT

This study aims to increase the motivation to learn accounting through The emergence of globalization which has had a massive impact on the Indonesian people, implies many things in various fields of life, including education. 21st century education is considered as an alternative form so that the younger generation is more adaptive in facing the times. Although not completely wrong, the negative impact of the various interpretations of the meaning of 21st century education is also unavoidable, one of which is the inequality of education in Indonesia. In urban communities, education appears as a trading commodity that encourages the emergence of social classes so that the system of “the rich get richer; the poor are getting poorer”; while in remote communities there is still a conventional system called by Paulo Freire as mute culture. Reflecting on this, humanist values show their urgency as an alternative that can solve these problems. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytic approach and collects information using a literature study. The results of the study indicate that humanist values are very important to be internalized in order to avoid the negative impact of inequality in the application of 21st century education, such as technocentrism use of appropriate learning and commercialization of education. methods, media and models; and the internalization of humanist contextual learning content values can be realized through the

1. Pendahuluan

Bersamaan dengan munculnya globalisasi sebagai fenomena besar yang tidak dapat dihindari, posisi mesin dan teknologi menjadi semakin penting untuk dikuasai karena secara otomatis telah memengaruhi *ritme* kehidupan dan norma-norma yang terbentuk. Proses dehumanisasi yang telah menjadi bahan diskusi bagi banyak seminar akhir-akhir ini sebagai dampak dari teknologi, melahirkan apa yang disebut Foucault sebagai “*the death of the subject*”. Proses ini dimaknai sebagai struktur hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dengan memberi makna kehadiran *electronic space*, seperti handphone, ATM, nintendo, komputer dan internet sebagai pengganti hubungan *face-to-face* secara substansial. Terlebih semenjak pandemi COVID-19, munculnya ruang elektronik secara masif telah menyebabkan pergeseran proses *social learning* yang memungkinkan kebiasaan empati dan simpati dalam hubungan manusia menjadi *social distancing*. Walaupun sekilas penguasaan kompetensi teknologi-informasi memang menjadi pilihan yang tepat untuk bertahan hidup dari kondisi pandemi, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ruang elektronik secara efisien telah menyebabkan suatu individu terpisah dari kelompok sosialnya (Dewi 2019).

Salah satu strategi yang seharusnya dapat merevitalisasi jati diri bangsa adalah melalui pendidikan. tidak hanya itu, potret pendidikan yang ideal, sejatinya mengemban misi untuk memanusiakan manusia atau

mengaktualisasikan potensi manusia sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam era yang serba kompetitif. Dalam studi kasus di Indonesia, pendidikan nasional harus senantiasa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Selain itu, pedoman pendidikan Indonesia diperinci kembali dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Merujuk dari landasan konstitusi ini maka dapat dilihat bahwa pendidikan bukan hanya sekadar menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual dan adaptif terhadap teknologi mutakhir, melainkan juga menjadi muara bagi manusia untuk memanusiakan manusia lainnya. Dalam konteks ini, M. Sastrapratedja menawarkan pendidikan yang berwawasan humanis, meliputi tiga kekuatan dalam diri yang harus ditumbuhkan, yaitu 1) daya untuk berbuat (*power to*); 2) solidaritas dan kekuatan bersama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dan kesejahteraan bersama

(*power with*); dan 3) kekuatan spiritual dan nilai-nilai yang ada dalam diri anak agar lebih manusiawi (*power within*) (Dewi 2019).

Namun demikian, pendidikan dewasa ini sedang mengalami krisis nilai. Di satu sisi, pendidikan hanya berpacu pada target untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara kognitif dan menguasai banyak teori dan teknologi; tetapi kering dari nilai-nilai humanis dan sosial dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada fenomena yang terjadi sampai sekarang bahwa keberhasilan seorang anak hanya ditentukan dari angka atau nilai raport, menguasai teknologi, cepat dapat gelar sarjana, gengsi jenis pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi dan sebagainya; tetapi luput untuk mempertanyakan sampai mana nilai-nilai humanistik, jujur, disiplin dan tanggungjawab ditanamkan oleh lembaga pendidikan. Lebih ironis dari hal tersebut, pendidikan yang semestinya menjadi wahana revitalisasi nilai-nilai humanis; justru menjadi salah satu komoditas marketisasi untuk investasi modal dan penjaminan penjuala massal teknologi informasi dan komunikasi baru. Walaupun telah mendapat banyak kritik, pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi problematika laten yang perlahan mulai dianggap lumrah. Selain itu, lunturnya nilai-nilai moral dalam budaya masyarakat dalam bentuk aksi-aksi negatif, seperti mentalitas korupsi, *cyber crime*, represi solidaritas sosial, meningkatnya semangat primordialisme dan sebagainya semakin menguat. Dalam potret fenomena ini ternyata telah terbukti bahwa kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang diagungkan dalam pendidikan abad 21, tidak serta-merta dapat mengurangi angka kriminalitas atau bahkan justru menyebabkan kaburnya nilai-nilai sosial dan humanisme dalam setiap individu.

Belum selesai dengan permasalahan sebagian besar pendidikan *urban*, masyarakat wilayah terpencil di sisi lain justru masih bersifat konvensional, seperti cara mengajar *teacher-sentris*, metode hapalan teks panjang, penilaian yang masih terkungkung terhadap aspek kognitif dan sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan pendidikan abad 21. Hal inilah yang disebut oleh Paulo Freire sebagai muara “kebudayaan bisu” (*the culture of silence*) (Bahri 2018). Kebudayaan bisu tercipta dari situasi yang menempatkan guru sebagai orang yang serba mengetahui segalanya sehingga apapun pengetahuan yang diucapkan, niscaya akan dihapalkan oleh peserta didik yang sudah terlebih dahulu dibungkam oleh ketakutan akan menanggapi apalagi mempersalahkan.

Pemikiran Paulo Freire dibidani oleh hal serupa yang terjadi di sebagian besar pendidikan Indonesia sebagai pendidikan “gaya bank”. Hubungan antara tiga aspek utama yaitu guru, peserta didik dan realitas dunia tidak pernah harmonis (Bahri 2018). Apabila guru seharusnya sebagai promotor tumbuh-kembangnya peserta didik dalam mengenali realitas di sekitarnya atau paling tidak menjadi kawan diskusi mengenai pengalaman apapun yang ditemukan, maka pendidikan “gaya bank” tidak pernah

memperkenalkan permasalahan kontekstual melainkan hanya memberi tuntutan untuk menghafal materi yang ada dalam buku teks. Paulo Freire memberi analogi pendidikan bagaikan “sistem bank” dimana peserta didik diberi pengetahuan agar ia dapat mendatangkan hasil dengan lipat ganda. Gaya pendidikan semacam ini jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi memenuhi tuntutan agar adaptif terhadap perubahan zaman melainkan justru menjadikan peserta didik tidak lebih dari sekadar obyek investasi dan sumber deposito potensial.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah dalam bentuk revisi kurikulum 2013 yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai Pelaksanaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan dan Pendidikan Menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dalam pengimplementasiannya, pembelajaran Kurikulum 2013 Revisi menuntut pendidik agar dapat mengembangkan pembelajaran dengan menginternalisasikan keterampilan 4C abad 21 dalam setiap kompetensi dasar yang diajarkan. Apabila ditelaah lebih dalam, maka konsep pendidikan abad 21 sebenarnya memiliki persinggungan makna dengan nilai-nilai humanis untuk bersama-sama meminimalisasi dampak negatif globalisasi. Konsep humanisme merujuk pada potensi dan bakat yang ada dalam diri agar diaktualisasikan sehingga menjadi realita, baik berupa pengetahuan, keahlian, sikap ataupun moral. Potensi-potensi diri berkembang secara

optimal karena adanya upaya sadar untuk mengembangkannya sejak dalam kandungan sampai pada tahap perhentian perkembangan (Masyithah 2019). Berkaitan dengan hal ini, Driyarkara (1989:9) sebagai salah satu pendidik humanis di Indonesia pernah menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia muda (Hasibuan dan Prastowo 2019). Oleh sebab itu, manusia sebaiknya tidak dipandang sebagai obyek; melainkan subyek yang memiliki kekuasaan untuk menentukan pilihannya sendiri secara bertanggungjawab serta hidup berdampingan dengan orang lain

Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, sebagaimana pendefinisian pernah dijabarkan oleh Prof. Dr. Sugiyono (2018:9) merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis. Lebih lanjut, Sugiyono pun pernah menyebutkan bahwa penelitian kualitatif tidak mungkin terbatas pada teori saja, tetapi harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan (Sugiyono 2018).

Jenis metode penelitian yang paling memungkinkan untuk situasi saat ini adalah kajian literatur, kepastakaan atau *library research*. Penelian kepastakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek atau pengumpulan data yang bersifat kepastakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal

Hasil dan Pembahasan

Wajah Pelaksanaan Pendidikan Abad ke-21

Apabila merujuk dari akar tujuannya, konsep pembelajaran abad 21 adalah mencetak lulusan yang memiliki kompetensi dalam penguasaan keterampilan berpikir, komunikasi yang kompleks dan menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhan dinamika global saat ini. Tidak hanya itu, sumber daya manusia saat ini juga dituntut untuk memiliki keterampilan berkolaborasi dan kreativitas dalam rangka menghadapi kompleksnya perkembangan dunia yang semakin pesat. Selaras dengan pernyataan ini, Sjafriani juga menyatakan bahwa pendidikan abad 21 lebih menuntut dua aspek yaitu kognitif dan psikomotorik. Lebih lanjut, pendidikan saat ini sangat dituntut untuk berpikir kritis dan positif (*critical and positive thinking*); menghubungkan segala ilmu (*connect all knowledge*); mampu menguasai teknologi dan informasi (*able to master technology and information*) serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi (*able to*

ini tentunya peneliti memastikan bahwa sumber yang digunakan adalah kredible dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pendekatan naratif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk memperoleh data tentang sejarah perjalanan hidupnya. Berfokus pada obyek penelitian, maka pendekatan fenomenologi ditelisis untuk menjabarkan urgensi humanisme dalam pendidikan abad 21 (Sugiyono 2018).

communication and cooperate). Sependapat dengan Sjafriani, Widayat menginterpretasikan pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi, informasi dan komunikasi.

Wajah dari implementasi pendidikan abad 21 dideskripsikan oleh Partnership for 21st century learning (P21) bahwa penguasaan mata pelajaran utama yang relevan dengan tema abad ke-21 sangat penting bagi keberhasilan peserta didik, seperti bahasa inggris, seni matematika, ekonomi, ilmu geografi, sejarah, pemerintah dan kewarganegaraan. Sementara itu, sekolah juga harus mempromosikan pemahaman mengenai konten akademik di tingkat yang lebih tinggi dengan merancang tema interdisipliner abad ke-21 menjadi mata pelajaran utama, antara lain: 1) kesadaran global; 2) literasi keuangan, ekonomi, bisnis dan kewirausahaan; 3) literasi

masyarakat; 4) literasi kesehatan; dan 5) literasi lingkungan. Pendidikan abad 21 ini memerlukan keterampilan dalam dunia nyata yang meliputi komunikasi, kolaborasi, kreativitas serta keterampilan kritis; sehingga dalam mengimplementasikan pendidikan abad 21; menggunakan generalisasi metode dan media pembelajaran sudah tidak lagi sesuai tetapi lebih kepada bagaimana cara peserta didik mempelajarinya sesuai dengan apa yang menjadi minat ataupun bakatnya (Chairunnisak 2020).

Walaupun terjadi ketidaksesuaian antara konsep dan realita dalam pengimplementasian pendidikan abad 21, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 telah menyatakan beberapa prinsip pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran abad 21, antara lain:

1. Dari peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu
2. Dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis multivariasi sumber belajar
3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah
4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi
5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi-dimensi
7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif

8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskill*)
9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat
10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodho*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*) dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*)
11. Pembelajaran tidak hanya berlangsung di sekolah, melainkan juga di rumah dan masyarakat
12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip “*siapa saja dapat jadi pendidik, siapa saja bisa jadi murid dan dimana saja bisa jadi kelas*”
13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; serta
14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik (Chairunnisak 2019).

Membaca dari segala tuntutan pada abad 21, maka tantangan dunia pendidikan masa depan adalah menyiapkan generasi yang sudah sedemikian akrab dan tinggi ketergantungan terhadap teknologi. Hal ini sekilas memang nampak menjadi cikal bakal terciptanya sebuah negara yang memiliki peradaban maju; tetapi belum tentu juga menciptakan manusia yang memiliki watak mulia, berdedikasi tinggi dan humanis. Dalam kaitan ini, Johannes Oentoro (Rektor Universitas Pelita Harapan) pernah

menyinggung tentang pergeseran makna pendidikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21 yang mengharuskan pendidikan untuk menciptakan manusia yang terampil, profesional serta banyak modal. Oleh sebab itu, paradigma lama yang memandang pendidikan sebagai proses idealisme dan kegiatan filantropisme yang memiliki tujuan “memanusiakan manusia” mengalami kekaburan karena fenomena *genetic manipulation* (manipulasi gen); *cyborg (cybernetic organism)*; *automation* (otomatisasi); dan *robotics* (robotik. Namun demikian, apakah hasil proses pemanusiaan itu “*human being*” atau “*techno being*”? (Dewi 2019).

Dengan mengutip istilah yang dikemukakan oleh Oentoro berkaitan dengan *human being* atau *techno being*; maka praktik komersialisasi pendidikan yang marak ditemui saat ini juga ditandai sebagai degradasi kualitas pendidikan untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang dapat “memanusiakan manusia” sesuai dengan pendidikan nasional Indonesia sulit tercapai. hal ini disebabkan pemerataan akses yang dituntut dalam pendidikan abad 21 memerlukan penaksiran pembiayaan yang seimbang. Meskipun aturannya sudah sangat jelas, tetapi masih ada kesenjangan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, mengingat kondisi Indonesia yang masih masuk dalam kategori negara berkembang maka tidak heran apabila ketimpangan pendidikan masih menjadi isu yang masih ada sampai saat ini. Dalam konteks implikasi penerapan pendidikan abad 21, terdapat beberapa implikasi yang dapat dilihat saat ini antara lain:

1. Teknosentrisme sebagai Wujud Dehumanisasi

Teknosentrisme (*technocentrism*) merupakan mentalitas teknologi yang memiliki tingkat kepercayaan berlebihan terhadap alat dan teknologi, seolah-olah segala sesuatu dapat teratasi dengan hanya mengandalkan teknologi. Dalam hal ini, sentuhan tangan manusia atau pranata konvensional tidak dipandang lebih dari sekadar sesuatu yang rendah karena inkonsistensi output, in-efisiensi proses produksi serta ketahanan yang tidak lama. Hal inilah yang memicu insiden dehumanisasi berupa transformasi kemerosotan tata nilai seperti kebenaran, kebaikan, keindahan (*estetika*) dan kesucian berangsur-angsur digantikan dengan sumber daya manusia yang hanya peka dan menghargai nilai-nilai dasar, seperti materi (kepemilikan kekayaan), hedonisme (kenikmatan jasmani) dan gengsi (prestise) (Dewi 2019)

Menurut Haslam (2006), dehumanisasi dari balik dimensi kemanusiaan, terdiri dari dua hal, antara lain: *pertama*, keunikan manusia (*human uniqueness*) yang mengacu pada keunikan atribut masing-masing manusia sehingga membedakannya dengan sifat hewan; dan *kedua*, sifat alami manusia (*human nature*) yang mengacu pada atribut kemanusiaan, meliputi emosi, kehangatan serta fleksibilitas sehingga membedakannya dengan mesin. Membaca dari kondisi yang marak terjadi akhir-akhir ini, dimana paradigma masyarakat mulai mengagung-

agungkan mesin sebagai faktor determinan dari strategi bertahan hidup, bersamaan dengan itu pula terjadi degradasi sifat kemanusiaan yaitu *human nature* dari diri manusia. Hal ini terjadi karena pengaruh revolusi industri dan teknologi yang semakin masif dari waktu ke waktu mulai menjangkiti segala bidang kehidupan, termasuk juga pendidikan. Pendidikan yang mulai didominasi oleh pola pikir dan pandangan *tekno sentris ansich* mendapatkan momentumnya ketika diberlakukan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang menginstruksikan proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode daring, alih-alih kesehatan peserta didik, pendidik dan seluruh warga sekolah adalah prioritas utama. Sebenarnya tidak ada yang keliru dengan kebijakan ini, namun pengimplementasiannya seringkali memicu pelanggaran-pelanggaran dari cita-cita humanisasi pendidikan (Dewi 2019)

Pada pola pendidikan yang berkarakteristik industri mengimplikasikan pola pikir peserta didik yang serba matematis-teknologis atau dikotomis. Jacob menyebutnya sebagai budaya terbelah atau dalam istilah Rene Decartes diinterpretasikan dengan konsep *rescogitans* dan *resextensa* yang hanya memuat benar atau salah, hitam atau putih dan sebagainya. Kenyataannya, pengklasifikasian dikotomis ini akan memunculkan masyarakat yang cenderung

kaku dan tidak bijaksana. Pada era industri saat ini, berbagai penyelenggaraan bidang pendidikan sejatinya bukan menciptakan kesemarakan ilmiah-alamiah, melainkan pembusukan pendidikan dan ketidakadilan yang tercermin pada perlakuan ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan perolehan materi secara langsung, seperti rumpun kerja humaniora (Hadi dan Nurhayati 2002)

2. Komersialisasi Pendidikan

Perubahan paradigma pendidikan abad 21 atau disebut Toffler (1970) sebagai masa *super industrial education system* merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengekalkan eksistensi suatu lembaga pendidikan, alih-alih mencetak generasi muda yang adaptif. Namun demikian, perubahan paradigma tersebut tidak mungkin dapat asal dilakukan secara cuma-cuma. Dalam era pasar bebas dan bisnis yang serba kompetitif berlaku ramalan Titur Maccius Plautaus (184 SM) bahwa "*homo homini lupus*" atau "setiap orang akan tega memakan orang lain" ternyata berlaku dalam dunia pendidikan. Alih-alih menaikkan mutu pendidikan, komersialisasi pendidikan sangat nampak terjadi saat tahun ajaran baru dimana perpindahan tinggi atau sekolah-sekolah untuk menaikkan tarif pendidikan. Namun demikian bagi ekonomi Indonesia yang masih dalam tahap berkembang, tingginya biaya pendidikan yang tidak diikuti dengan naiknya pendapatan masyarakat menyebabkan pendidikan dengan mutu tinggi hanya dapat diakses oleh golongan orang berada.

Komersialisasi pendidikan memiliki makna sederhana yaitu memperdagangkan pendidikan. Adapun penjabaran definisi, lebih lanjut dikemukakan oleh Milton Friedman dan Frederik Van Hayek dalam Agus Wibowo (2008:115) bahwa komersialisasi pendidikan merupakan pendidikan yang berpegang pada masyarakat industri dan selera pasar (*market society*). Dalam situasi yang sama, Darmaningtyas (2005:257) juga menyumbangkan pemikirannya dalam mengartikan komersialisasi pendidikan sebagai instrumen untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat. Relevan dengan pengembangan makna sejumlah ahli, realitas tersebut seringkali diungkapkan dalam pemikiran filosofis pendidikan Paulo Freire bahwa sebagian besar manusia menderita sedemikian rupa, sementara sebagian lain menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang tidak adil dan *hedonis*. Persoalan tersebut dengan radikal diistilahkan oleh Freire sebagai situasi penindasan dan ketertindasan yang tidak berperikemanusiaan.

Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung telah menciptakan jurang pemisah antara pihak yang memiliki modal dan pihak dengan sedikit modal. Sebagaimana diungkap oleh Ivan Illich dalam Benny Susanto (2005: 119) bahwa komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern mengabdikan

terhadap kepentingan pemilik modal dan bukan sarana pembebasan bagi kaum tertindas. Alih-alih semua berbasis teknologi, pemungutan biaya tinggi dipergunakan untuk melakukan renovasi besar-besaran dari konvensional ke modern, seperti infrastruktur dan jasa yang melekat teknologi, laboratorium canggih, perpustakaan digital dan sebagainya. Sementara, sebagian besar sekolah dengan standar menengah ke bawah tentu tidak dapat mengikuti gaya dan fasilitas yang diberikan sekolah *elite* (Hartini 2011).

Pada hakikatnya, proses pendidikan pasti memerlukan pendanaan. Penggunaan dana tergantung dari kuantitas dan kualitas fasilitas sarana prasarana yang diharapkan hadir dalam proses pendidikan. Kualitas yang baik tentu saja memerlukan pembiayaan yang memadai. Dengan demikian, tidak heran apabila pendidikan bukan saja diproyeksikan untuk memanusiaikan manusia, melainkan juga ladang para pemodal untuk mendapatkan profit, baik untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi. Implikasinya sangat jelas ketara adanya klasifikasi mutu lembaga pendidikan yang didasarkan atas seberapa besar tuntutan pembiayaan.

Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah sekaligus filosof asal Inggris dalam karyanya yang berjudul *Civilization on Trial or Challenge and Response* menyatakan bahwa naik-turunnya peradaban sejarah tergantung pada tantangan dan respon yang dihadapi. Dalam hal ini, tantangan diinterpretasikan sebagai masalah besar yang tidak dapat terpecahkan dalam waktu dan

tempat; sementara respon atau jawaban terletak pada generasi berikutnya, baik bersifat positif atau negatif maupun aktif atau pasif. Dalam ujaran karyanya, Toynbee menyatakan keprihatinan yang menyangkut kenyataan bahwa kemajuan teknologi modern tidak mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik, tetapi justru menimbulkan ketidakadilan sosial dalam distribusi kekayaan yang diciptakan oleh inovasi teknologi (Dewi 2019)

Johannes Oentoro pernah menyinggung pergeseran makna pendidikan yang terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21. Dalam berbagai potret fenomena telah banyak menunjukkan gejala paradigma pendidikan lama yang memandang pendidikan sebagai proses idealisasi dan kegiatan filantropisme dengan orientasi “memanusiakan manusia” mengalami kekaburan karena fenomena *genetic manipulation* (manipulasi gen), *cyborg* (*cybernetic organism*), *automation* (otomatisasi) dan *robotic* (robotis). Sebagai gantinya, paradigma modern yang mengharuskan manusia untuk terampil dan profesional dengan orientasi mendapatkan modal sebanyak mungkin semakin menjadi jelas. Jadi, pertanyaan yang paling krusial akhir-akhir ini ketika berbicara mengenai halaman pendidikan adalah hasil proses pemanusiaan itu “*human being or techno-being?*”.

Retorika inilah yang menggambarkan nuansa pendidikan saat ini, dimana maraknya praktik-praktik komersialisasi pendidikan

semakin menurunkan kualitas pendidikan dan menggerus harapan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Walaupun harus diakui bahwa regulasi pembiayaan di setiap instansi pendidikan tidak dapat dipukul rata, tetapi sangat ketara masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya. Praktik-praktik komersialisasi dengan alasan apapun jelas tidak dibenarkan dalam cita-cita pendidikan nasional yang seharusnya bertujuan mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Indonesia tentu harus dilengkapi dengan serangkaian implikasi pembiayaan yang seimbang guna memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan suatu sekolah atau perpendidikan tinggi sebagai upaya menciptakan pemerataan pendidikan.

Meninjau dalam Undang-Undang Indonesia Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Selain itu, salah satu tujuan Negara Kesatuan republik Indonesia juga tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berpijak dari landasan inilah semestinya pendidikan nasional disusun sebagai usaha agr bangsa Indonesia dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Namun demikian, hal ini masih bersifat general karena setiap generasi muda yang berhak memperoleh pendidikan belum tentu memperoleh perlakuan, sarana-prasarana dan sebagainya yang sama pula. Biar bagaimanapun biaya pendidikan yang mahal

juga menentukan kualitas lembaga pendidikan, lebih-lebih era globalisasi yang menuntut pembaharuan kemajuan tetapi acuh dalam mempertimbangkan bagaimana cara pembaharuan kemajuan tersebut diwujudkan oleh suatu negara. Kita tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa biaya pendidikan sekolah negeri favorit juga mematok biaya pendidikan yang hampir sama dengan sekolah swasta dalam rangka memperbaharui kualitas fasilitas dan mutu pendidikan.

Tidak hanya itu, praktik pendidikan formal juga bertransformasi dari tujuan untuk mengonservasi nilai-nilai budaya menjadi menjejali pemikiran peserta didik dengan doktrin “penciptaan kemajuan teknologi” untuk menyesuaikan peserta didik dengan sumber daya yang dibutuhkan pasar internasional. Dalam kaitan ini, terdapat tiga dampak yang menjadi konsekuensi antara lain: 1) hubungan antara kapitalisme dan pendidikan kota menyebabkan praktik-praktik sekolah lebih mendukung kontrol ekonomi kelas-kelas *elite*; 2) hubungan antara kapitalisme dan ilmu pengetahuan telah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan hanya mempertimbangkan profit material dibanding menciptakan kehidupan global yang lebih baik; serta 3) perkawinan antara kapitalisme dan pendidikan serta kapitalisme-ilmu pengetahuan menciptakan pondasi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai kooperasi dengan mengorbankan keadilan sosial dan martabat kemanusiaan (Asmirawati dan Jamaluddin 2016).

Tanpa menghilangkan fakta, penulis

tidak dapat menyalahkan pemerintah sepenuhnya dalam hal ini karena program pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi pembeda dari keadaan yang dihadapi Brazil ketika Paulo Freire hidup. Namun demikian, banyak masyarakat yang mengeluh bahwa dana tersebut kurang membantu meringankan peserta didik, atau paling tidak membuatnya setara dengan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas. Selain dijejali Smbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), masih banyak pungutan luar sekolah seperti pembelian LKS mandiri, dana karyawisata dan sebagainya (Asmirawati dan Jamaluddin 2016).

Sebenarnya, persoalan mengenai mahalnya pendidikan bukanlah masalah kemarin tetapi bertambah parah semenjak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 tanggal 9 Maret 2020 yang menjadikan pembelajaran dilakukan secara *online* atau jarak jauh. Pandemi COVID-19 benar-benar mengubah pembelajaran secara drastis dari konvensional tatap muka menjadi bergantung dengan perangkat teknologi. Menanggapi hal ini, tentu tidak hanya adaptasi psikologi anak melainkan juga pembiayaan yang lebih dari orang tua untuk memenuhi fasilitas guna menunjang pembelajaran anaknya. Konsekuensinya sangat memprihatinkan. Sebagaimana yang diungkap oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD

Dasmen) Kemendikbudristek, Jumeri mencatat angka anak putus sekolah di masa pandemi mencapai 1,12 persen atau naik hingga 10 kali lipat (Fernita 2022). Dalam situasi yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti menyampaikan hasil studinya bahwa kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin juga meningkat hingga 10%. Hal ini nyata ditunjukkan dalam hal kesenjangan kualitas belajar di rumah antara si kaya yang dapat menyediakan fasilitas mumpuni seperti laptop, modem dan aplikasi lain serta memberikan bimbingan untuk membantu anaknya beradaptasi, tidak dimiliki oleh si “miskin”. Kesenjangan inilah yang memengaruhi penurunan kemampuan peserta didik atau *learning loss* (Yopi 2022).

Internalisasi Humanisme dalam Pendidikan Abad 21

Pendidikan humanis pada abad 21 akhir-akhir ini menjadi wacana yang masih terus dikembangkan. Dalam merealisasikan cita-cita setiap bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat, hidup sejajar dan terhormat dalam kalangan bangsa-bangsa lain; maka pendidikan abad 21 harus mengintegrasikan karakteristik humanisasi dalam setiap unsurnya. Adapun strategi untuk menginternalisasi nilai-nilai humanisme, antara lain:

1. Model Pendidikan di Masa Mendatang

Dalam menginternalisasikan nilai-nilai humanis, pendidik memiliki peran sebagai fasilitator,

pelatih (*coach*), pendamping atau bahkan secara ekstrem dalam sejumlah konteks dapat juga pendidik dan peserta didik sama-sama belajar dan menuntut ilmu melalui serangkaian interaksi yang ada di antara keduanya ketika sedang membahas suatu materi tertentu. Walaupun harus diakui bahwa orientasi jalannya pembelajaran memang harus bertransformasi dari pendidik memberi tahu dan peserta didik mendengarkan penjelasan pendidik; menjadi pendidik dan peserta sama-sama sebagai “kawan diskusi”; pemahaman seorang pendidik akan menentukan warna dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam mengenai internalisasi nilai-nilai humanisme dalam setiap unsur pendidikan abad 21, antara lain:

a. Pemanfaatan Media, Model dan Metode Pendidikan yang Mendukung

Media komunikasi pembelajaran menjadi salah satu komponen terpenting yang menentukan keberhasilan internalisasi nilai-nilai humanis dalam pendidikan abad 21. Menurut Zainiyati (2017), media pembelajaran merupakan segala hal yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik; ataupun sebaliknya sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan peserta didik yang membuat proses belajar terjadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Berbicara mengenai pendidikan abad 21, media pembelajaran berbasis internet, komputer dan sebagainya sudah tidak lagi asing

dibicarakan. Hal ini disebabkan banyaknya fitur dan elemen yang menjadikan media pembelajaran memiliki daya tarik bagi peserta didik. Selain itu, berbagai macam konten seperti gambar, video, teks, grafik, animasi dan efek suara yang disertai dengan menu atau instruksi semakin mempermudah pendidik untuk menyampaikan konten pembelajaran. Namun demikian, tidak semua instansi di seluruh Indonesia memiliki akses dan fasilitas yang sama untuk menyediakan media pembelajaran bagi peserta didiknya. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan pendidikan menjadi problematika klasik sampai saat ini (Habib, Astra dan Utomo 2020).

Tujuan pendidikan nasional tidak hanya mencetak sumber daya manusia yang cerdas, melainkan juga mencetak kepribadian yang berakhlak, berakhlak, kreatif, memiliki visi-misi serta bertanggungjawab sebagai warga negara yang baik. Membaca dari konsep humanisasi, kemampuan kompetensi teknologi tidak sepenuhnya menjadi barometer kemajuan berpikir; tetapi juga cara seseorang dalam mengimplementasikan potensi yang dimiliki agar berguna bagi orang banyak; kemampuan mengelola diri sendiri serta orang lain. Oleh sebab itu, penggunaan media pembelajaran yang berbasis ketersediaan suatu instansi dan peserta didik adalah pilihan yang paling bijaksana dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Realitas ini dapat dilihat dalam berbagai potret pendidikan saat ini; salah satunya ketimpangan pendidikan di

wilayah 3T pada masa kini. Dalam kasus ini, seorang pendidik dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menentukan jalannya pembelajaran; mengingat kondisi wilayah 3T yang tidak memungkinkan dapat menjangkau jaringan seluler dan internet ataupun keterbatasan kepemilikan peralatan dan media penunjang bagi peserta didik. Untuk meminimalisasi terjadinya ketimpangan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan merancang model pembelajaran berbasis kearifan lokal yang mengedepankan prinsip “ASICT”; meliputi asimilasi dan akomodasi, *supporting; innovate teaching and learning; comprehensive assesment* dan *technological used* (Dudung, Sudrajat, et al., Model Penyelenggaraan Pendidikan untuk Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal yang Mengakomodasi Keberagaman Kondisi Lingkungan, Sosial dan Budaya Setempat Berbasis Kearifan Lokal 2018)

b. Integrasi Konten Pembelajaran yang Kontekstual

Sebelum pendidikan Indonesia berintegrasikan dengan karakteristik abad 21 dan nilai-nilai humanis; sebagian besar muatan pembelajaran bersifat statis dan hapalan. Salah satunya dapat dilihat dalam pembelajaran sejarah; dimana sebagian besar isi pembelajarannya menuntut peserta didik untuk menghafal sebanyak mungkin sehingga mematikan daya kritis dan kreativitas secara perlahan bahkan juga menyalahi hakikat manusia sebagai makhluk yang merdeka.

Interpretasi yang mengejutkan hakikat manusia sebenarnya sangatlah beragam, tergantung dari perspektif mana kita meninjau. Ada beberapa konsep tentang makna manusia, antara lain *homo sapiens* sebagai makhluk berakal budi, *animal rational* atau makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, *homo laquen* atau makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa, *homo faber* atau makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan. Merujuk pada interpretasi Immanuel Kant bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang bebas bertindak berdasarkan alasan moral, bukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu dari elemen penting seorang individu dikatakan sebagai manusia.

Dalam substansi kebebasan, Freire mengungkapkan perspektifnya dimana manusia menjadi penguasa atas dirinya sendiri dan bebas melakukan apapun sesuai pilihannya dalam hal berpikir, berkreasi dan berinovasi. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Joyce, Weil dan Showers (1992) yang menyatakan bahwa hakikat mengajar (*teaching*) adalah membantu peserta didik untuk memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir dan sarana untuk mengekspresikan potensinya. Sehubungan dengan dua argumentasi tersebut, kita seharusnya sepakat bahwa pikiran seseorang tidak selalu sama karena konteks dimana ia hidup dan pengalaman yang dilalui secara otomatis memengaruhi dirinya. Merujuk dari konstruksi pemahaman inilah materi pelajaran di

lingkungan peserta didik satu belum tentu dibutuhkan oleh peserta didik di lingkungan hidup yang lain; atau secara sederhana dikatakan sebagai belajar sesuatu kebutuhan. Inilah pembelajaran yang disebut sebagai pendekatan kontekstual; dimana pendidik bukan lagi bertindak sebagai figur yang dominan di kelas; melainkan selaku fasilitator, motivator atau bahkan kawan diskusi yang membantu peserta didik agar memiliki daya kritis dan kreativitas dalam menganalisis fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Oleh sebab itu, pengalaman dan pengetahuan peserta didik adalah salah satu elemen yang harus diintegrasikan dalam suatu materi pembelajaran tertentu dengan menggunakan berbagai model pembelajaran, seperti penemuan, keterampilan proses, eksperimen, demonstrasi, diskusi dan sebagainya. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya dituntut untuk sekadar cerdas dalam intelektual ataupun mengoperasikan alat teknologi mutakhir; melainkan juga melatih kerja sama, *sharing idea* ataupun pengalaman, saling komunikasi dan sebagainya sehingga tercipta interaksi yang positif antara peserta didik dengan guru maupun peserta didik satu dengan yang lain (Pendidikan 2010).

Kesimpulan

Perkembangan kemajuan pemikiran masyarakat telah mengikutsertakan pendidikan menjadi kebutuhan pokok setiap individu. Selain itu, pendidikan juga merupakan faktor determinan yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dari kemajuan peradaban sebuah bangsa. Menghempas berbagai kenyataan

tersebut, pendidikan menyimpan pokok persoalan yang menjadi keprihatinan kita saat ini. Betapa tidak? Bersamaan dengan arus globalisasi yang menuntut pembaharuan di segala bidang kehidupan, telah berkembang teknosentrisme; dimana manusia memiliki kecenderungan untuk semakin mengangung-angungkan teknologi di atas kompetensi yang lain; serta kapitalisme pendidikan sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa hanya menginsplisitkan pemerataan anak usia sekolah diwajibkan untuk sekolah tanpa mempertimbangkan pemerataan jaminan mutu pendidikan yang didapat. Sementara dalam persoalan lain, evaluasi dan inovasi pendidikan di Indonesia masih dalam tahap berkembang untuk mencari bentuk kurikulum konkret yang bisa dipastikan.

Dalam kaitan persoalan pendidikan di Indonesia, mengingatkan penulis pada pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan kritis yang humanis. Apabila ditelaah lebih

mendalam, pemikiran Paulo Freire memiliki relevansi yang ambivalen dengan pendidikan Indonesia yang sedang merangkak untuk mengidentifikasi dirinya sebagai pendidikan abad 21. Di satu sisi, keterampilan 4C abad 21 sangat sesuai dengan nebula inti pemikiran Paulo Freire yang menggagas pendidikan sebagai ajang pembebasan bagi mereka yang tertindas melalui konsepsi dialog, komunikasi dan analisis kritis terhadap permasalahan kontekstual. Selain itu, penting pula untuk ditambahkan bahwa media, metode dan model pembelajaran memang tidak dapat digeneralisasi antara instansi satu dengan yang lain sebab kebutuhan, keterbatasan, budaya dan sebagainya berbeda. Oleh sebab itu, penting bagi pendidik untuk cermat dalam mengamati arah pembelajaran apakah yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan latar belakang peserta didik serta keterbatasan instansi yang ia tempati sehingga pendidikan abad 21 yang berciri humanis dapat tercapai.

REFERENSI

- Asmirawati, Sulfasyah, and Jamaluddin Arifin. 2016. "Komersialisasi Pendidikan." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 2* 174-183.
- Bahri, Samsul. 2018. "Pendidik yang Membelajarkan (Gaya Bank vs Hadap Masalah)." *IQRO: Journal of Islamic Education Vol. 2 No. 1* 1-16.
- Chairunnisak. 2020. "Implementasi Pembelajaran Abad 21 di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNIMED*. Medan: Universitas Negeri Medan. 351-359.
- Dewi, Eva. 2019. "Potret Pendidikan di Era Globalisasi (Teknosentrisme dan Proses Dehumanisasi)." *SUKMA: JURNAL PENDIDIKAN Volume 3 Issue 1*, 93-116.
- Farmita, Artika Rachmi. 2022. *Putus Sekolah Akibat Pandemi COVID-19 Naik 10 Kali Lipat. Ini Kata Kemendikbud*. 01 16. Accessed 06 07, 2022. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/16/200036281/putus-sekolah-akibat-pandemi-covid-19-naik-10-kali-lipat-ini-kata?page=all>.
- Freire, Paulo. 2020 (cet.2). *Pendidikan Kaum Tertindas terjemahan dari Pedagogy of the Oppressed*. Yogyakarta: Narasi.
- Habib, Ahmad, I Made Astra, and Erry Utomo. 2020. "Media Pembelajaran Abad 21: Kebutuhan Multimedia Interaktif bagi Guru dan Siswa Sekolah Dasar." *JARTIKA: Jurnal Riset Teknologi dan Inovasi Pendidikan, Vol. 3 No. 1* 25-35.
- Hartini, Dwi. 2011. *KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI Kuasa Modal dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta tahun 2011*). S.Pd Skripsi, Surakarta: perpustakaan.uns.ac.id.
- Hasibuan, Ahmad Tarmizi, and Andi Prastowo. 2019. "Konsep Pendidikan Abad 21: Kepemimpinan Pengembangan Sumber Daya Manusia." *MAGISTRA - Volume 10 Nomor 1* 26-50.
- Hasnawati. 2006. "Pendekatan Contextual Teaching Learning Hubungannya dengan Evaluasi Pembelajaran." *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 3 Nomor 1* 53-62.
- Masyithah. 2019. "Humanisasi dalam Paradigma Pendidikan yang Nyaris Terabaikan." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1*, 14-21.
- Pendidikan, Tim Paradigma. 2010. *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yopi, Makdori. 2021. *Pandemi COVID-19 Menerpa, Angka Putus Sekolah Meningkat*. 09 22. Accessed 06 07, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4664482/pandemi-covid-19-menerpa-angka-putus-sekolah-meningkat>.